

ABSTRAK

PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

(Studi pada Inspektorat Provinsi Lampung)

Oleh

MEISSY WIRANSYA VIRGINIA

Masih terdapat kasus peyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah di Provinsi Lampung, seperti kasus suap untuk biaya proyek infrastruktur di Lampung Utara dan kasus *mark-up* dana bantuan sosial Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berdasarkan konsepsi pengawasan yang dikemukakan oleh Pasaribu:2011, yaitu Pemeriksaan, Pemantauan, Tindak Disiplin, dan Tindak Koreksi atau Evaluasi. Hasil Penelitian: 1. Inspektorat Provinsi Lampung telah melaksanakan prinsip pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dan sistematis terhadap instansi pemerintah atau lembaga publik di Provinsi Lampung. Namun hal ini belum maksimal karena pengawasan yang dilakukan tidak menyeluruh atau hanya pada kondisi dan situasi tertentu. 2. Melalui kegiatan pemantauan, seperti monitoring APBD dan PBJ melalui kegiatan ini inspektorat dapat menemukan indikasi kegiatan yang tidak sesuai atau pemborosan yang dapat mengarah kepada penyalahgunaan wewenang. 3. Tindakan disiplin inspektorat menerapkan prosedur yang ketat terhadap anggota personel yang melanggar standar etika dan profesionalisme. Namun, dalam tindak disiplin Inspektorat hanya berwenang dalam sebatas pelanggaran disiplin ASN, jika pelanggaran pidana akan ditindak lanjuti oleh penegak hukum. 4. Melalui pendekatan pemberian tindak koreksi dan evaluasi dengan cara memberikan waktu untuk perangkat daerah memperbaiki kesalahan administrasi.

Kata kunci : Pengawasan, Pencegahan, Penyalahgunaan Wewenang

ABSTRAK

INSPECTORATE SUPERVISION IN PREVENTION OF ABUSE OF AUTHORITY

(Study at the Inspectorate of Lampung Province)

By

MEISSY WIRANSYA VIRGINIA

There are still cases of abuse of authority committed by government officials in Lampung Province, such as the bribery case for infrastructure project costs in North Lampung and the Covid-19 social assistance fund mark-up case. This study aims to determine the supervision of the Inspectorate of Lampung Province in preventing abuse of authority. This research uses qualitative methodology by using data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. This research is based on the concept of supervision put forward by Pasaribu: 2011, namely Inspection, Monitoring, Disciplinary Action, and Corrective Action or Evaluation. Research Results: 1. The Inspectorate of Lampung Province has implemented the principle of supervision by conducting periodic and systematic examinations of government agencies or public institutions in Lampung Province. However, this has not been maximized because the supervision carried out is not comprehensive or only in certain conditions and situations. 2. Through monitoring activities, such as monitoring the APBD and PBJ through this activity the inspectorate can find indications of inappropriate or wasteful activities that can lead to abuse of authority. 3. Disciplinary action The inspectorate applies strict procedures against personnel members who violate ethical standards and professionalism. However, in disciplinary action the Inspectorate is only authorized to limit violations of ASN discipline, if criminal violations will be followed up by law enforcement. 4. Through the approach of providing correction and evaluation actions by giving time for regional apparatus to correct administrative errors.

Keywords: Supervision, Prevention, Abuse of Authority